

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 38
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Menteri PANRB 2. Menteri Dalam Negeri 3. Ketua KASN 4. Kepala BNPP
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 19 Juli 2016
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Pembahasan RAPBN 2017 (lanjutan)
Ketua Rapat	: Rambe Kamarul Zaman/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 26 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Selasa, 19 Juli 2016 dibuka pada pukul 14.30 yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan Pembahasan RAPBN 2017.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Ketua KASN dan Kepala BNPP untuk memberikan pemaparannya dan mempersilahkan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

II. KESIMPULAN

- A. Terhadap pagu anggaran tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp4.105.612.526.000,- dan BNPP sebesar Rp186.348.626.000,- Komisi II DPR RI setuju untuk dibawa dalam pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI, namun untuk pengalokasian anggaran berdasarkan program, Komisi II DPR RI akan mem bahas nya kembali secara lebih mendalam pada Raker/RDP yang akan datang.
- B. Terhadap pagu anggaran tahun 2017 Kementerian PANRB sebesar Rp203.504.700.000,- (termasuk di dalamnya adalah pagu anggaran untuk KASN

sebesar Rp42.682.000.000,-) Komisi II DPR RI setuju untuk dibawa dalam pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI, namun untuk pengalokasian anggaran berdasarkan program, Komisi II DPR RI akan membahasnya kembali secara lebih mendalam pada Raker/RDP yang akan datang.

- C. Terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp3.539.486.068.000,- yang akan dialokasikan pada 6 program dan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Rp250.000.000.000,- untuk pusat dan Rp750.000.000.000,- untuk Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk menjamin keberlangsungan pelayanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia, Komisi II DPR RI akan membahasnya lebih lanjut pada Raker/RDP yang akan datang.
- D. Terhadap usulan DAK tahun 2017 yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari:
1. DAK Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebesar Rp300.000.000.000,-
 2. DAK Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran, sebesar Rp300.000.000.000,-
 3. DAK Prasarana Pemerintahan Daerah, sebesar Rp500.000.000.000,-
 4. DAK Transportasi Perdesaan, sebesar Rp1.566.311.870.000,-
 5. DAK Pembangunan Kantor Desa, sebesar Rp500.000.000.000,-
 6. DAK Non Fisik untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebesar Rp34.000.000.000,-

Komisi II DPR RI akan membahasnya lebih lanjut pada Raker/RDP yang akan datang.

- E. Terhadap usulan tambahan anggaran BNPP sebesar Rp37.000.000.000,- Komisi II DPR RI akan membahasnya lebih lanjut pada Raker/RDP yang akan datang.
- F. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar dalam pengalokasian anggaran tahun 2017 juga mengakomodir bantuan dana bagi partai politik, termasuk yang belum terselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya, serta alokasi anggaran untuk pembentukan daerah persiapan.
- G. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, BNPP, dan KASN untuk menyampaikan rincian kegiatan dan alokasi anggaran pasca ditetapkannya APBN Perubahan tahun 2016, yang akan dijadikan sebagai materi pendukung dalam pembahasan lanjutan RAPBN tahun 2017.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.15 WIB.

Jakarta, 19 Juli 2016
Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Rambe Kamarul Zaman
A-236

